

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUDUS**

Oleh:

Erika Ningrum Sari, Mochammad Mustam

**Departemen Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos  
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

Micro, small, medium enterprises or commonly known as UMKM is an independent productive economy national program, conducted by individuals without any constraints on other business companies. Many of UMKM doesn't handled by the related office as the consequence of the huge amount of UMKM in Kudus regency. The Department of Manpower, Industry, Cooperatives and UMKM of Kudus regency runs the program in accordance with the planned programs and activities that are developed on the Renstra on the program by developing the small and micro enterprises due to improving the prosperity of the people in Kudus regency. The development program for the small and micro enterprises which was undertaken by the government attracted the writer to undergo a research that whether the development of umkm has been effective or not effective yet. The purpose of this study is to determine whether the development of umkm conducted by Disnakerperinkopukm Kudus has been effective or not. Researchers used 4 aspects to measure the effectiveness of the development of UMKM program in Kudus regency identified from the productivity, motivation, adaptation and integrity. The method used in this research is descriptive qualitative method. The result of this research shows that Disnakerperinkopukm of Kudus Regency in conducting empowerment through the umkm development is optimal, while there are some aspects that not optimal yet, it is related to the procurement of minimum training quota and the uneffective socialization. Recommendations gained from the research are; increasing the quota for business development training and socialization related to government policy about UMKM.

**Key Word : Efectivity, Productivity, Motivation, Adaptation, Integrity.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut UMKM yaitu program ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan tanpa menganak pada badan perusahaan lain. Secara umum UMKM memiliki ciri manajemen yang berdiri sendiri, memiliki modal sendiri, daerah pemasarannya lokal, asset perusahaannya kecil, dan jumlah pekerja yang dimiliki terbatas.

Pasal 33 UU No. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengembangan daya saing UMKM merupakan bagian dari kegiatan perekonomian nasional. Salah satu yang menjalankan program UMKM yaitu kabupaten Kudus. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB (produk domestik regional bruto). Jumlah perusahaan di kabupaten Kudus termasuk UMKM mencapai 13.482 dengan kosentrasi bidang

usaha yang berbeda-beda. Dilihat dari jenis industrinya, terdapat tiga jenis industri andalan daerah ini, yaitu industri tembakau, industri percetakan, penerbitan, dan kertas, dan industri makanan dan minuman.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus bidang Koperasi dan UKM merupakan instansi pemerintah dalam menangani dan melayani masyarakat khususnya pelaku UMKM. Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Kudus tentang pemberdayaan masyarakat, Disnakerperinkopukm bidang Koperasi dan UKM dalam melakukan kegiatan pengembangan UMKM mengacu pada Renstra tentang Rencana Program dan Kegiatan pengembangan UMKM sebagai berikut :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
  - a. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah.
  - b. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
  - a. Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .
  - a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
  - b. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - a. Pendidikan dan pelatihan formal.

Pelaksanaan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus sudah dilakukan semenjak di berlakukannya Undang-undang yang

menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan kegiatan perekonomian nasional dan harus dijalankan disetiap daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kudus membuat kebijakan tentang pemberdayaan UMKM. Kegiatan ini dilakukan guna untuk tercapainya UMKM yang berdaya saing dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui UMKM. Dalam melakukan kegiatan pengembangan UMKM ini pemerintah Kabupaten Kudus melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Selain melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan UMKM ini, pemerintah Kabupaten Kudus berperan dalam kepengurusan permodalan dan kepengurusan legalisasi usaha. Kegiatan-kegiatan pengembangan UMKM yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus ini telah disesuaikan dengan rencan program dan kegiatan yang sudah disusun pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM

bidang Koperasi dan UKM yang sudah dijelaskan diatas.

Semakin banyaknya UMKM yang setiap tahunnya meningkat dan jumlah pegawai yang terbatas membuat banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Kudus tidak terdaftar dan masih banyak UMKM yang belum ikut serta dalam program pengembangan yang dilakukann oleh Disnakerperinkop. Untuk itu, dalam pelaksanaan pengembangan UMKM terhambat karena masih banyaknya UMKM yang tercakup oleh pemerintah Kabupaten Kudus.

Melihat pernyataan-pernyataan diatas untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus sudah terlaksana dengan baik atau belum baik, maka di perlukannya penelitian lebih lanjut tentang melihat bagaimana **“Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Program Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Kudus.”**

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah harus mempunyai unsur-unsur yang jelas

dan tepat karena akan menentukan suatu sub pokok bahasan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun perumusan masalahnya, yaitu Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengembangan program usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Kudus dengan adanya program yang sudah ada ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, Mengetahui Pelaksanaan Pengembangan Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Kudus sudah terlaksana sesuai sasaran/ efektif atau belum efektif.

### **D. Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **1. Administrasi Publik**

Menurut Edward H. Litchfield Administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai dan digerakkan,

serta dipimpin. Selain itu, Administrasi publik juga menekankan bahwa bagaimana suatu organisasi pemerintah, bagaimana kepemimpinannya dan bagaimana suatu organisasi tersebut akan digerakkan. (Syafiie, 2010:25).

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang paradigma administrasi publik, diantaranya adalah : **Nicholas Henry** (1975). **Nicholas Henry** memusatkan pengamatannya atas “lokus dan fokus” dari ilmu administrasi. Pada dasarnya, administrasi publik terbagi atas tiga paradigma yaitu teori klasik, *New Publik Management*, dan *New Public Service*. Mengenai teori klasik, **Bryant** dan **White**, mengemukakan ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk lebih memahami organisasi dan fungsi manajemen, yang di bagi dalam 2 kelompok, yaitu teori organisasi dan teori perilaku. (Sedarmayanti. 2010:10). Beberapa tahun terakhir berkembang paradigma baru yang mengarah pada administrasi publik yang difokuskan

untuk menghasilkan “*high quality public goods and services*”.

*New Public Management* dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. (Sedarmayanti. 2010:23)

Tahun 2003, paradigma baru *The New Public Service* oleh **J.V. Denhardt** dan **R.B. Denhardt** (2003) menyarankan meninggalkan prinsip administrasi klasik dan *Reinventing Government* atau *New Public Mnagement*, beralih ke prinsip *New Public Service*.

## 2. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat Thomas ini hampir senada dengan pendapat Goerge C. Edward III dan Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa

yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat dilakukan pemerintah dalam bentuk undang-undang, *statement*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. (Sri Suwitri,2011:9)

### **3. Implementasi Kebijakan**

Sebaik-baik nya suatu kebijakan adalah kebijakan yang dapat di implementasikan, oleh karena itu dalam suatu penyelesaian permasalahan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan menjadi suatu hal yang sangat penting. Secara luas yang implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan undang-undang, dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program- program ( Winarno, 2013 : 147 ). Implementasi dapat juga diartikan sebagai keluaran tentang sejauhmana tujuan yang telah direncanakan tersebut mendapat dukungan berupa dana.

### **4. Efektivitas**

Efektifitas merupakan pencapaian tujuan yang dipandang sebagai tujuan akhir oleh sebuah organisasi, dan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Steers dalam (Indrawijaya, 2008:46) mengemukakan bahwa efektifitas berupa sejauh mana suatu organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.

### **5. Pengukuran Efektivitas**

Emitai Etzioni (Indrawijaya, 2010:187) mengemukakan pengukuran efektifitas organisasi mencakup 4 kriteria yaitu :

1. Adaptasi, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara internal untuk menghadapi perubahan eksternal.
2. Integrasi, tingkat kemampuan organisasi mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya.

3. Motivasi, keterikatan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

## **6. Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Nugroho, 2007:117)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Produktivitas/ keluaran yang sudah dihasilkan oleh Disnakerprinkopukm.**

Disnakerperinkopukm Kudus telah melakukan serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan untuk pengembangan UMKM berdasarkan pada Renstra tentang Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kegiatan tersebut antara lain : pengadaan pelatihan pengembangan usaha, pameran produk UMKM, kepengurusan legalisasi usaha dan kepengurusan permodalan. Akan tetapi penyediaan kuota pelatihan pengembangan ini masih terbatas sehingga perlu dipertimbangkan. Secara keseluruhan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam melakukan pemberdayaan UMKM melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan UMKM telah sesuai dengan rencana program dan kegiatan pada Renstra.

### **B. Motivasi Pegawai Disnakerperinkop Secara Internal dan Eksternal.**

Dinsnakerperinkopukm Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi yaitu menjadikan UMKM yang berdaya saing. Disnakerperinkopukm menggunakan misi Kabupaten Kudus dan visi Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus dijadikan motivasi pegawai

Disnakerperinkopukm dalam menjalankan tugas mereka untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Kudus melalui UMKM. Selain itu juga motivasi internal pegawainya yaitu dengan jaminan yang diberikan dan juga gaji yang mereka dapatkan. Dapat disimpulkan bahwa Disnakerperinkop dalam memotivasi pegawai secara internal dan eksternal sudah sesuai dengan sasaran.

#### **C. Adaptasi Pegawai Disnakerperinkopukm.**

Adaptasi secara internal disesuaikan pada Renstra tentang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pegawai. Pegawai Dinsakerperinkopukm harus mampu menyesuaikan diri terhadap peraturan yang sudah dibuat pada Renstra sehingga diharapkan mampu menghadapi perubahan eksternal organisasi. Akan tetapi dalam hal ini masih terkendala oleh beberapa pegawai yang belum menguasai teknologi. Selain itu juga Disnakerperinkop dituntut untuk dapat menyesuaikan pada lingkungan luar organisasi dengan melakukan

beberapa pendekatan kepada masyarakat guna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Disimpulkan bahwa Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus dalam adaptasi secara internal dan eksternal belum dikatakan sepenuhnya sesuai dengan sasaran

#### **D. Integrasi/ Kemampuan Organisasi dalam Penyampaian Informasi.**

Dalam menyampaikan informasi Disnakerperinkop Kudus berdasarkan pada rencana program dan kegiatan pada Renstra tentang Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Dalam penyampaian informasi Dinsakerperinkopukm Kudus melakukan sosialisasi, pembuatan brosur dan pengumuman yang dibuat pada website dinas. Dapat disimpulkan bahwa Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan penyampaian informasi/ integrasi dinas kepada masyarakat sudah sesuai dengan rencana program dan kegiatan pada Renstra.

## **PENUTUP**

### **1) Kesimpulan**

Pelaksanaan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus dilakukan untuk menjalankan implementasi suatu kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberdayaan UMKM dengan tujuan agar UMKM yang ada di Kabupaten Kudus dapat berdaya saing dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui UMKM.

Dalam pelaksanaan pengembangan UMKM ini, dilakukannya kegiatan-kegiatan pengembangan yang disesuaikan dengan rencana program dan kegiatan yang sudah disusun pada Renstra. Adapun kegiatannya dapat dilihat dari aspek produktivitas, motivasi, adaptasi dan integrasi. Setelah melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dalam melakukan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Kudus sudah berjalan efektif. Hal ini dapat

disimpulkan lebih rinci sebagai berikut :

1. Produktivitas yang sudah dilakukan oleh Disnakerperinkop Kabupaten Kudus yaitu sudah sesuai pada rencana program dan kegiatan pada Renstra dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan guna untuk melakukan pengembangan usaha. Akan tetapi terdapat masalah pada penyediaan kuota pelatihan.
2. Motivasi Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus sesuai dengan visi dan misi Disnakerperinkopukm dan pegawai Disnakerperinkop sudah sesuai dengan hak yang mereka terima.
3. Adaptasi sudah dilakukan dan disesuaikan pada rencana program dan kegiatan pada Renstra, akan tetapi pada internal organisasi yaitu pegawai belum berjalan maksimal karena masih ada pegawai yang belum menguasai teknologi.
4. Integrasi yang dilakukan Disnakerperinkop akan

penyampaian kegiatan-kegiatan yang dibuat sudah sesuai pada rencana program dan kegiatan pada Renstra, walaupun pada kegiatan sosialisasi belum efektif.

## 2). Saran

1. Pada adaptasi pegawai masih banyak pegawai dinas yang belum menguasai teknologi, disarankan untuk diadakannya pelatihan untuk pegawai.
2. Bagian integritas Disnakerperinkopukm dalam pengadaan sosialisasi yang semula dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain, disarankan untuk mengadakan agenda sosialisasi sendiri terkait UMKM dengan tujuan agar lebih efektif dalam penyampaian informasi mengenai wawasan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Creswell, John W. ; Fawaid, Akhmad. 2012. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,*

*dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen, Edisi 2.* Yogyakarta: BPFE

Indrawijaya.2008. *Perilaku Organisasi.* Bandung: Sinar Baru Algensindo

Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu Edisi 3.* Yogyakarta: Gavamedia

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosada Karya

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan.* Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi.* Jakarta : PT Bumi Aksara

Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi.* Jakarta: Erlangga.

Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan*

*Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT RINEKA CIPTA

Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Jakarta : PT. Buku Seru.

Dasar Hukum :

Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Penelitian Terdahulu :

Dani Danuar Tri Utami. 2013. *Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang*

Irawati Abdul.2014. *Implementasi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil*

*Menengah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo*

Prof Ina Primiana. 2015. *Peningkatan Daya Saing UMKM Jawa Barat Dalam Menopang Perekonomian Nasional Menghadapi Persaingan Global*

Wiwiek Rabiatul Adawiyah. 2013. *Faktor penghambat pertumbuhan usaha mikro kecil menengah studi di Kabupaten Banyumas*

H.A Suprpto. 2015. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Memperkuat Cadangan Devisa Negara melalui Ekspor.

Website :

Profil Dinas Perinkopukm Kudus (<http://perinkopumkmkudus.blogspot.co.id/>) diakses pada tanggal 07 Agustus 2016 Pukul 16.00 WIB

Kondisi UMKM Kudus (<http://www.radiosuarakudus.com/2016/03/jumlah-umkm-di-kudus-terus-mengalami-peningkatan.html>)

diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 Pukul 19.00 WIB

Permasalahan UMKM (<http://www.suaramedia.com/ekono>

mi-bisnis/usaha-kecil-dan-  
menengah/22424-solusi-masalah-  
klasik-usaha-kecil-diindonesia.html)  
diakses pada tanggal 20 Desember  
2016 Pukul 10.00 WIB